

## Efektivitas Pengembangan Kompetensi ASN melalui Sista Praja oleh BPSDM Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2022 : Studi pada Pelatihan PBJP Level-1

Esih <sup>1\*</sup>; Rudiana <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia; esih19001@mail.unpad.ac.id

\*Correspondence : esih19001@mail.unpad.ac.id

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pengembangan kompetensi ASN melalui Sista Praja pada Pelatihan PBJP Level-1 yang ditinjau dengan teori pendekatan efektivitas menurut S.B. Hari Lubis (2011), yaitu pendekatan sumber, pendekatan proses, dan pendekatan sasaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Sista Praja Pelatihan PBJP Level-1 belum sepenuhnya efektif. Organisasi berupaya bekerja sama untuk memperoleh berbagai sumber yang dibutuhkannya. Sista Praja juga memberikan kesempatan yang luas untuk aparatur melakukan pengembangan kompetensi 20 Jam Pelajaran/Tahun walaupun pada prosesnya terdapat kelebihan dan kekurangan komitmen pribadi peserta dalam melaksanakan pembelajaran mandiri. Dalam sarasannya, persentase kelulusan peserta pelatihan mengikuti uji kompetensi belum mencapai seratus persen dikarenakan soal yang dirasa sulit, tidak ada praktik, dan kurangnya waktu peserta dalam memahami materi. Di sisi lain, persentase tersebut diatas rata-rata dan peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari pelatihan ke dalam pekerjaannya.

### ABSTRACT

The purpose of this study is to describe and analyze the effectiveness of ASN competency development through Sista Praja at PBJP Level-1 Training which is reviewed with the theory of effectiveness approach according to S.B. Hari Lubis (2011), namely the System Resource Approach, Internal Process Approach, and Goal Approach. The research method used is a qualitative method that is descriptive. Data collection techniques in this study were carried out by literature studies and field studies consisting of observation, interviews, and documentation. The result of this study is that the Sista Praja PBJP Level-1 Training has not been fully effective. Organizations seek to work together to obtain the various resources they need. Sista Praja also provides extensive opportunities for apparatuses to develop competencies of 20 Hours of Lessons/Year even though in the process there are advantages and disadvantages of participants' personal commitment in carrying out independent learning. In its target, the percentage of passing trainees taking the competency test has not reached one hundred percent due to questions that are considered difficult, there is no practice, and lack of time for participants to understand the material. On the other hand, the percentage is above average and participants can apply the knowledge gained from training to their work.

### Kata kunci

*Aparatur Sipil Negara, Efektivitas, PBJP, Sista Praja*

### Keywords

*State Civil Apparatus, Effectiveness, PBJP, Sista Praja*

## Pendahuluan

Birokrasi merupakan alat untuk mempermudah jalannya penerapan kebijakan pemerintah dalam upaya melayani masyarakat (Mustafa, 2014). Masyarakat sebagai pengguna layanan birokrasi sering mengeluh mengenai kualitas dan kuantitas aparat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dari proses/waktu pelayanan yang lama, sikap aparat yang kurang bersahabat, sarana prasarana seadanya, dan kualitas layanan yang tidak optimal (Kadarisman, 2018). Dengan adanya hal tersebut kemudian muncul sebuah reformasi birokrasi untuk bisa memperbaharui sistem birokrasi kearah yang baik dan lebih benar.

Reformasi birokrasi dilaksanakan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi yang memiliki citra buruk. Pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjelaskan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi visi pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yaitu "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur". Reformasi birokrasi memiliki visi "Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia" dimana terlaksananya aparatur pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab untuk menuju pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan misi reformasi birokrasi yaitu mengubah pola pikir (*mindset*), pola budaya (*culture set*), dan sistem tata kelola pemerintahan (Mustafa, 2014).

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) dengan pelayanan publik yang efektif dan efisien, prima, responsif, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), amanah, akuntabel, dan transparan dapat diwujudkan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten sesuai dengan tuntutan tugasnya. ASN tersebut merupakan tolak ukur baik buruknya kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. ASN yang berkompeten dapat diperoleh melalui pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat merupakan perangkat daerah dengan tugas melakukan fungsi penunjang urusan pemerintahan bagian pengembangan SDM dalam peningkatan kompetensi ASN. BPSDM Provinsi Jawa Barat menyiapkan berbagai media pembelajaran, salah satunya adalah melalui Sistem Pembelajaran Aparatur Jabar Diajar (Sista Praja). Sista Praja merupakan media pengembangan kompetensi melalui metode pembelajaran mandiri, dapat diakses melalui website BPSDM Provinsi Jawa Barat kapan saja dan dimana saja, bersifat *open course*, dan aparatur tersebut dapat mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan minat dan kebutuhan organisasi (Yuliawantini, 2021). Sista Praja diharapkan menjawab amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 70 yang menyatakan bahwa setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran. Selain

itu, Sista Praja juga diharapkan menjawab amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 dimana setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi, dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (*Corporate University*).

Dalam Sista Praja terdapat beberapa program pengembangan kompetensi, salah satunya adalah Pembelajaran 20 JP Per Tahun yang didalamnya terdapat Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Mandiri. Namun, pada pelaksanaan pelatihan tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2021-2022 terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan yang dialami adalah tidak adanya anggaran untuk pengembangan aplikasi Sista Praja pada tahun 2021-2022, adanya ASN yang tidak menyelesaikan pelatihan, serta ASN yang bersertifikat kompetensi belum tercapai 100%. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai efektivitas pengembangan kompetensi ASN melalui Sista Praja dengan menggunakan teori pendekatan efektivitas menurut S.B. Hari Lubis (2011). Teori pendekatan efektivitas tersebut memiliki 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan sumber (*system resource approach*), pendekatan proses (*internal process approach*), dan pendekatan sasaran (*goal approach*).

Dari permasalahan yang dinyatakan sebelumnya, dapat diketahui bahwa yang pertama dilihat dari sumber yang dipunyai, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPSDM Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2022, bahwa tidak adanya anggaran untuk pengembangan aplikasi Sista Praja. Kedua, dilihat dari prosesnya, ASN yang mengikuti Pelatihan PBJP Kompetensi Level-1/Dasar melalui Sista Praja tahun 2021-2022 tidak semuanya menyelesaikan pelatihan. Hal tersebut dapat diketahui dalam penyelenggaraannya pada tahun 2021, dari jumlah awal peserta adalah 121 orang, hanya 34 orang yang menyelesaikan tahapan pelatihan sampai akhir. Sedangkan pada tahun 2022, dari 480 peserta, hanya 59 peserta yang menyelesaikan tahapan pelatihan sampai akhir atau dari *pre test* sampai dengan *post test*. Ketiga, jika dilihat dari sasaran, ASN yang bersertifikat kompetensi belum tercapai 100%. Hal tersebut dapat diketahui dari 34 orang yang menyelesaikan tahapan pelatihan (*pre test* sampai *post test*) pada tahun 2021, hanya 11 peserta yang lulus mengikuti uji kompetensi atau sebanyak 32%. Sedangkan pada tahun 2022, dari 59 peserta, hanya 29 peserta yang lulus mengikuti uji kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa atau sebanyak 49%.

Hal tersebut sama seperti yang dinyatakan oleh Benny RM Nainggolan dan Tetty Tiurma Uli Sipahutar, yaitu berdasarkan data LKPP, bahwa jumlah peserta pelatihan yang ikut dan yang lulus ujian tidak signifikan tingkat kelulusannya. Hal tersebut tidak bisa terlepas dari faktor minat, usia, dan motivasi (Nainggolan & Sipahutar, 2022). Selain faktor tersebut, Nur Basuki juga menjelaskan bahwa faktor praktek pengadaan barang/jasa, kecukupan waktu belajar, teknis ujian, dan *try out*

dapat mempengaruhi prestasi belajar peserta pelatihan pengadaan barang/jasa peserta pelatihan di BPSDM Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2005-2016. Dimana peserta yang lulus ujian hanya 18% pertahun (Basuki, 2019).

Diadakannya pelatihan pengadaan barang/jasa bertujuan untuk menghasilkan ASN yang kompeten ditengah keberadaan kasus korupsi. Kasus tersebut menunjukkan dibutuhkannya transparansi dan akuntabilitas ASN dalam mengerjakan tugas. Dengan adanya Sista Praja yang merupakan pelatihan mandiri *e-learning* memiliki potensi yang bagus dalam memenuhi tuntutan terlaksananya pemenuhan hak pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP/T.

Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Wahyu Saputra Basri dkk yang bertujuan untuk memahami pengembangan kompetensi PNS dalam *e-learning* dengan *Learning Management System* (LMS) di BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana penerapan pelatihan nonklasikal *e-learning* dinilai belum baik karena masih terjadi beberapa permasalahan. Permasalahan yang terjadi seperti tingkat pemahaman PNS mengenai teknologi masih berbeda-beda, inisiatif peserta yang kurang dalam pelatihan *e-learning*, dan tidak adanya pengawasan selama proses pelatihan (Basri, Huseno, & Johannes, 2021).

Hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terdapat pada lokasi penelitian dan fokus pembahasan yang akan diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di BPSDM Provinsi Jawa Barat. Fokus pembahasan dalam penelitian ini mengenai efektivitas pelatihan *e-learning* melalui Sista Praja pada Pelatihan PBJP Level-1/Dasar. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pengembangan kompetensi ASN melalui Sista Praja oleh BPSDM Provinsi Jawa Barat tahun 2021-2022 studi pada Pelatihan PBJP Level-1.

## Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dengan analisis data yang bersifat induktif, serta hasil penelitian menekankan pada makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2014). Penelitian ini juga lebih bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda, Analis Kebijakan Ahli Muda, Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat pada BPSDM Provinsi Jawa Barat, serta Peserta Pelatihan PBJP Level-1 melalui Sista Praja lima orang. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik validasi data triangulasi sumber. Dimana, penulis mengecek data mengenai Sista Praja bagian Pelatihan PBJP Level 1

yang didapatkan dari beberapa sumber. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model dari Miles dan Huberman (1984) seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2014; Hidayat, R., & Chandrawati, T. 2023).

## Hasil dan Pembahasan

### Efektivitas Pengembangan Kompetensi ASN melalui Sista Praja oleh BPSDM Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2022 pada Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1

#### 1. Pendekatan Sumber

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan organisasi dalam mendapatkan berbagai macam sumber (input) yang dibutuhkannya. Pendekatan ini bertumpu pada pemikiran bahwa organisasi harus dapat memperoleh berbagai macam sumber yang dibutuhkannya, dan juga memelihara keandalan sistem organisasi agar bisa tetap atau menjadi lebih efektif. Keberhasilan mendapatkan berbagai jenis sumber untuk memelihara sistem merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur efektivitas (Lubis, 2011). Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pengembangan kompetensi ASN melalui Sistem Pembelajaran Aparatur Jabar Diajar (Sista Praja) tahun 2021-2022 pada Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1, diketahui bahwa pendekatan sumber dapat dilihat dari tiga dimensi berikut ini:

##### 1) Kemampuan Organisasi dalam Memanfaatkan Lingkungan untuk Mendapatkan Berbagai Jenis Sumber yang Sifatnya Langka dan Mahal

Dalam Sista Praja Pelatihan PBJP Level-1 tahun 2021-2022 memiliki beberapa sumber daya pendukung pelaksanaan. Sumber daya pendukung tersebut diantaranya yaitu sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana, serta sumber daya modal. Sumber daya manusia terdiri dari tenaga IT, tim pengajar, dan fasilitator. Selanjutnya sumber daya sarana dan prasarana seperti server, komputer, dan aplikasi, serta juga sumber daya modal berupa dana/anggaran.

Dengan jumlah sumber daya manusia yang ada, BPSDM Provinsi Jawa Barat mampu mencapai target ketetapan karena keunggulannya dari sisi *skill*, pengetahuan dan *attitude* yang sesuai harapan. SDM tersebut memiliki karakter yang baik dan unggul serta bersemangat untuk mengembangkan Sista Praja kedepannya. Keunggulan lainnya adalah SDM yang mengelola Sista Praja yang berasal dari *Command Center* sudah bagus secara teknis dan mempunyai modal untuk membuat video yang bagus. Dimana selain bidang SKPK yang mengembangkan, dibantu juga oleh teman-teman *Command Center* yang bekerjanya masih terbagi antara kehumasan dan penyiapan Sista Praja. Dengan adanya hal tersebut juga diharapkan ada penambahan SDM yang bisa *handle* video-video pembelajaran.

Lalu, pada sumber daya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Sista Praja Pelatihan PBJP Level-1 seperti server, komputer dan aplikasi tidak bermasalah dan

sudah standar. Meskipun apabila ingin maksimal harus diupgrade. Untuk *bandwidth* internet juga sudah ditambah oleh lembaga, namun sebetulnya yang menggunakan adalah peserta, sehingga untuk kekuatan internet dari para peserta Sista Praja merupakan tanggung jawab penggunaan pribadi masing-masing peserta.

Selanjutnya, untuk sumber daya modal dana/anggaran, terdapatnya kelemahan. Kelemahan tersebut adalah keterbatasannya dana yang dimiliki. Dimana tidak adanya anggaran untuk pengembangan aplikasi Sista Praja pada tahun 2021-2022. Dengan keterbatasan dana yang berasal dari APBD Jawa Barat, ada beberapa target yang diturunkan. Keterbatasan anggaran dikarenakan karena anggaran yang ada berfokus pada penanganan Covid-19. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Tugiman yang merupakan Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, yaitu sebagaimana berikut :

*"... Adapun kelemahannya tentu saja karena kita memiliki keterbatasan sumber dana, dana kita terbatas. Artinya kita ingin memberikan hasil yang maksimal tapi ada keterbatasan anggaran sehingga beberapa kita turunkan targetnya." (Wawancara, Maret 2023)*

Dengan terbatasnya anggaran yang mengakibatkan diturunkannya beberapa target tersebut, BPSDM mencoba untuk memanfaatkan sumber lain yang ada untuk mendukung pelaksanaan Sista Praja. BPSDM memanfaatkan sumber belajar yang gratis dan kerja sama dengan berbagai pihak. Pihak-pihak yang diajak kerja sama mulai dari satuan akademik, bisnis, usaha, pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa serta menarik orang yang kompeten untuk pengisi di Sista Praja. Hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan oleh Tugiman yang merupakan Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, yaitu bahwa :

*"Cara mengatasinya tentu saja tadi dari sisi anggaran yang terbatas kita mencoba memanfaatkan sumber-sumber belajar yang sifatnya gratis, yang melalui kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari squad akademik, kemudian juga dengan bisnis, dengan usaha, kemudian dengan pemerintah lainnya, kemudian juga dengan masyarakat, dan juga kita mencoba untuk menarik orang-orang yang berkompeten untuk pengisi di Sista Praja." (Wawancara, Maret 2023)*

BPSDM juga khususnya bidang SKPK juga berupaya mendapatkan sumber daya manusia yang mumpuni dan tambahan anggaran untuk pengembangan Sista Praja. Selain itu, memanfaatkan Widyaiswara untuk materi pembelajaran. Hal tersebut dilakukan agar Sista Praja tetap berjalan dengan baik.

BPSDM dalam hal ini, walau terdapat masalah tidak adanya anggaran pengembangan aplikasi Sista Praja pada tahun 2021-2022 dan terdapat sumber daya pengelola yang tugasnya masih terbagi dengan pekerjaan yang lain, mampu memanfaatkan lingkungan untuk mendapatkan jenis sumber yang langka dan mahal. BPSDM dapat dikatakan efektif dalam memanfaatkan lingkungan untuk mendapatkan sumber yang kurang tersebut dan baik dalam melihat peluang. Hal tersebut dilaksanakan dengan mencari sumber-sumber belajar yang sifatnya gratis dan melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak.

2) Kemampuan Organisasi untuk Menghasilkan Output Tertentu dengan Menggunakan Sumber-Sumber yang Berhasil Diperoleh

Dengan sumber daya yang terbatas, seperti sumber daya manusia dan dana/anggaran, BPSDM Provinsi Jawa Barat berupaya menetapkan *output* sumber materi yang baik. Dari hasil penelitian, dengan adanya keterbatasan anggaran yang dikarenakan pandemi Covid-19, berpengaruh juga pada bahan pembelajaran pelatihan. APBD Jawa Barat yang berprioritas pada kesehatan dan ekonomi menyebabkan terpotongnya anggaran untuk pengembangan aplikasi Sista Praja dan *upgrade* peralatan. Anggaran yang dimiliki oleh BPSDM terbatas untuk gaji teman-teman pengelolanya saja. Hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan oleh Angga Muchlis Al Rachmad sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda, yaitu sebagai berikut :

*"Dari anggaran APBD. Saya lihat ada dua hal pertama mungkin pada dua tahun itu adalah tahun ketika kita mengalami pandemi covid, dimana semua anggaran pada waktu itu disesuaikan untuk pemulihan di era pandemi itu, jadi memang banyak anggaran yang memang dipotong disitu selama dua tahun itu, terutama tahun tersebut juga akhirnya berbicara prioritas. Karena pada waktu itu prioritasnya kesehatan dan ekonomi jadi akhirnya memang 2020 sama 2021 tidak ada anggaran pengembangannya. Terbatas untuk gaji teman-teman di pengelolanya saja. Untuk pengembangan aplikasi dll atau upgrade peralatan itu tidak ada." (Wawancara, Maret 2023)*

Pengembangan aplikasi Sista Praja sendiri salah satunya adalah terkait dengan bagaimana cara pengemasan bahan pembelajaran agar lebih menarik. Namun, untuk membuat bahan pembelajaran tersebut menarik butuh banyak *effort* dan dana. Bahan pembelajaran pelatihan yang diberikan kepada peserta sendiri masih dirasa konvensional. Hal tersebut juga sesuai dengan yang dinyatakan oleh Angga Muchlis Al Rachmad sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda, yaitu bahwa :

*"Pengembangan aplikasi Sista Praja ini bisa saja berbeda dengan yang lain, kalau saya melihatnya bahwa pengembangan Sista Praja itu adalah semuanya sangat tergantung pada namanya kemasan, bagaimana kita mengemas video pembelajaran supaya menarik. Nah untuk bisa menjadi menarik seperti ini butuh banyak effort, banyak supporting dana." (Wawancara, Maret 2023)*

*"... Saya liat pun setiap video pembelajaran masih belum mengikuti trend, saya pikir masih konvensional, masih typing, minim grafis dll." (Wawancara, Maret 2023)*

Dengan adanya hal tersebut membuat konten pembelajaran kurang menarik dan belum maksimal. Maka dari itu, anggaran yang diterima oleh BPSDM juga mempengaruhi konten-konten pembelajaran yang diberikan kepada peserta dalam penyelenggaraan pelatihan. Selain itu, berpengaruh juga pada peralatan penunjang yang harus di*upgrade* seperti komputer dan lainnya.

Pada sisi lain, dilihat dari materi yang diberikan kepada peserta Pelatihan PBJP Level-1 melalui Sista Praja, peserta setuju bahwa banyak mendapatkan materi. Materi yang disajikan juga membantu peserta menghadapi ujian. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahsin Achfas yang merupakan peserta Pelatihan PBJP Level-1 tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

*"Materinya membantu. Jadi ujian-ujian yang ditanyakan, banyak materi-materi yang diberikan banyak keluar di ujian. Tetapi dari materi tersebut, kita harus mengembangkan. Jadi ada contoh materi ini, kita harus berpikir lebih lanjut. Materi cukup baik, cukup lengkap, dan banyak yang keluar materi yang dari Sista Praja. Undang-Undang dikasih, materi tiap-tiap bab dikasih, cukup lengkap." (Wawancara, Maret 2023)*

Sumber-sumber materi yang di berikan dalam Sista Praja Pelatihan PBJP Level-1 di mata peserta lain memiliki beberapa pandangan yang berbeda. Pandangan tersebut menggambarkan kelebihan dan kekurangan yang di rasa. Dari lima orang peserta yang diwawancarai, penulis menyimpulkan bahwa : Kelebihannya adalah para peserta mendapatkan banyak materi yang mudah diperoleh/*download*. Materi tersebut jelas dan terstruktur, membantu pembelajaran mandiri peserta untuk menghadapi ujian kompetensi terutama video dan ppt, dimana materi dari modul banyak yang keluar saat ujian. Kekurangannya adalah materi harus dikembangkan dan dalam modul kurang sedikit kelengkapannya dilihat dari adanya soal dari tes modul yang tidak ada di materi.

Selanjutnya, kemampuan organisasi untuk menghasilkan output tertentu lainnya adalah adanya penambahan *Coaching Clinic*. Sehingga, yang awalnya hanya pelatihan saja, sekarang ditambahkan program *Coaching Clinic*. Program tersebut bertujuan untuk menambah jumlah lulusan sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

Dari penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa kemampuan organisasi untuk menghasilkan *output* tertentu dengan menggunakan sumber-sumber yang berhasil peroleh dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif. Dengan keterbatasan anggaran yang ada berpengaruh pada pengembangan aplikasi mengenai pengemasan bahan pembelajaran dan *upgrade* peralatan. Konten pembelajaran tersebut belum maksimal namun telah juga memberikan banyak materi kepada peserta pelatihan dan menambah program baru *Coaching Clinic*. Disamping itu terdapat sedikit kekurangan pada soal tes modul yang tidak ada dalam materi modulnya atau perlunya pengembangan materi.

### 3) Kemampuan Organisasi untuk Bereaksi dan Menyesuaikan Diri Terhadap Perubahan Lingkungan

Organisasi dalam hal ini BPSDM Provinsi Jawa Barat mampu bereaksi dalam perubahan terhadap lingkungan. Hal tersebut dengan diberikannya pemahaman kepada *stakeholder* mengenai penggunaan *e-learning* agar inovasi pembelajaran secara daring tetap mencapai tujuannya. Selain itu, organisasi tetap berproses dengan adanya peningkatan indeks profesional ASN. Pemberian pemahaman tersebut seperti yang dinyatakan oleh Tugiman yang merupakan Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, yaitu bahwa :

*"Memberikan pengertian, pemahaman, kepada stakeholder terkait dengan model pembelajaran baru menggunakan e-learning yang non klasikal ini, agar mereka bisa menyesuaikan diri sehingga proses pembelajaran walaupun secara daring itu dapat tetap efektif mencapai tujuan pembelajaran."*  
(Wawancara, Maret 2023)

Maka dapat diketahui bahwa mengingat Sista Praja merupakan sebuah inovasi baru dalam pengembangan kompetensi, organisasi mampu memberikan pemahaman dan tetap berproses. Hal tersebut dapat menyatakan bahwa kemampuan organisasi untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dinilai efektif.



## 2. Pendekatan Proses

Pendekatan ini untuk melihat sejauh mana efektivitas sebagai tingkat efisiensi dan kondisi organisasi internal. Pendekatan ini berpandangan bahwa pada organisasi yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki, yang dianggap dapat menggambarkan sebuah tingkat efisiensi (Lubis, 2011). Pada pendekatan proses dalam pengembangan kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Aparatur Jabar Diajar (Sista Praja) tahun 2021-2022 pada Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1

### 1) Proses Pelaksanaan Pelatihan yang Disediakan Organisasi

Awal dari proses pelaksanaan pelatihan adalah peserta mengetahui adanya Pelatihan PBJP Level-1 melalui Sista Praja yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Jawa Barat. Peserta tersebut mengetahui informasi mengenai Sista Praja melalui media sosial. Selain media sosial Instagram, peserta lainnya mengetahui informasi lebih lanjut dari Latsar CPNS, grup *Whatsapp*, grup *Telegram*, dan pekerjaan serta Rapim. Selanjutnya, ASN mengikuti pengembangan kompetensi secara mandiri melalui *e-learning* BPSDM. Pengembangan kompetensi tersebut berjalan sesuai dengan mekanisme pembelajaran yang ada, seperti *pre test*, melaksanakan pembelajaran mandiri mengakses modul dan video pembelajaran, *post test*, dan penguatan dari pengajar sampai mendapatkan e-sertifikat.

Pelatihan PBJP Level-1 melalui Sista Praja dapat diikuti oleh semua ASN di lingkungan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota Jawa Barat. Selain prioritas tersebut, pelatihan melalui Sista Praja dapat diikuti oleh ASN luar Provinsi Jawa Barat. Semua ASN tersebut mengikuti pelatihan sebagai syarat untuk menduduki jabatan tertentu yang diharuskan memiliki sertifikat PBJ. Selain itu, dapat juga dilaksanakan sebagai penambah wawasan. Pelatihan tersebut dilaksanakan secara *online* dan di luar jam kantor sehingga tidak ada masalah. Alasan lainnya yaitu untuk menambah kompetensi dan mempunyai jam pelajaran, karena *self-learning* dan bisa belajar dimana saja. Hal tersebut juga tidak jauh diimbangi dengan adanya informasi bahwa kompetensi pengadaan barang jasa merupakan salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki oleh aparatur negara.

Penyelenggaraan proses Pelatihan PBJP Level-1 melalui Sista Praja tersebut memiliki keunggulan dalam memberikan keleluasaan kepada aparatur untuk mengaksesnya. Jangka waktu yang diberikan adalah satu bulan, peserta mengikutinya sesuai dengan waktu yang mereka miliki. Hal tersebut juga yang menjadikan perbedaan antara Pelatihan PBJP Level-1 melalui Sista Praja dengan Pelatihan PBJP Level-1 secara klasikal yang mempunyai waktu khusus atau penetapan hari serta dari pagi sampai sore. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Irma Yuliantini sebagai Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda, yaitu bahwa :

*"Perbedaannya kalau yang klasikal itu, mereka punya waktu khusus, jadi yang PBJ klasikal mempunyai waktu khusus misalkan lima hari, dari pagi sampai sore. Kalau untuk yang Sista Praja,*

*dia tidak mempunyai waktu khusus. Tidak ditetapkan lima hari, melainkan target pembelajarannya satu bulan. Mereka mulai menyelesaikan pagi, siang, sore, malam, semuanya terserah aparatur, yang paling penting satu bulan itu proses pembelajaran bisa selesai.” (Wawancara, Maret 2023)*

Kemudahan yang diberikan dalam pengembangan kompetensi ASN melalui Sista Praja yang diselenggarakan dalam jangka waktu satu bulan, dan dapat dikerjakan dimana saja, kapan saja tanpa penetapan waktu khusus tersebut dirasakan dan disetujui oleh peserta. Hal tersebut juga menjadi sebuah alasan peserta dalam mengikuti Pelatihan PBJP Level-1 melalui Sista Praja. Dimana peserta merasa dapat belajar dengan efektif kapan saja saat ada waktu. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Fanikal Zulfari Rizqi yang merupakan peserta Pelatihan PBJP Level-1 tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

*“Alasannya mengikuti karena PBJ di Sista Praja bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Kita bisa belajar jam berapa saja, dimana saja kalau kita ada waktu. Beda dengan kelas-kelas offline yang harus tatap muka, yang harus datang langsung. Kalau Sista Praja sangat efektiflah untuk orang-orang yang mungkin sibuk atau gimana.” (Wawancara, Maret 2023)*

Dibandingkan proses pengembangan kompetensi ASN melalui pelatihan klasikal, peserta lainnya juga berpendapat bahwa Sista Praja Pelatihan PBJP Level-1 lebih komprehensif. Selain itu, tidak ditentukan waktunya, bisa dikerjakan saat pulang kerja atau istirahat. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Bugy Agung Nugraha yang merupakan peserta pelatihan tahun 2021, yaitu dengan adanya hal tersebut, pekerjaan tidak terhambat oleh diklat.

Dari penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan pelatihan yang disediakan organisasi dapat dinilai efektif dan efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari kemudahan para peserta mendapatkan informasi pelatihan dari media sosial. Selain itu, proses pelaksanaan pelatihan sesuai dengan mekanisme pembelajaran yang sudah berjalan dengan baik. Kegiatan tersebut dirasa efisien mempermudah peserta dalam melaksanakan pelatihannya yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja mengikuti waktu luang peserta, serta tidak perlu datang ke tempat pelatihan karena berbasis *online*. Dengan adanya hal tersebut mempermudah peserta dalam meningkatkan kompetensinya dan mempunyai jam pelajaran.

## 2) Proses Pelaksanaan Pelatihan yang Dirasakan Peserta

Pada proses pelaksanaannya, tampilan yang diperoleh para peserta saat melakukan Pelatihan PBJP Level-1 melalui Sista Praja tahun 2021-2022 diawali dengan membuka situs *e-learning* BPSDM Provinsi Jawa Barat dan *login* dengan memasukan *username* dan *password* masing-masing. Selanjutnya peserta melakukan pembelajaran mandiri dan memperoleh materi. Setiap bagian materi dilengkapi dengan video pembelajaran, buku informasi materi, dan *power point* materi. Selain itu, setiap materi terdiri dari sub materi, latihan soal, tes materi. Tes materi diberikan *passing grade* 80 sebagai syarat untuk melanjutkan ke materi selanjutnya. Setelah semua materi terselesaikan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan *Try Out* berupa simulasi ujian berbasis komputer PBJP Tingkat Dasar dan melaksanakan *Post*

*Test*. Setelah itu, maka peserta dapat mengunduh sertifikat pelatihan mandiri dan mengupload permohonan ujian sertifikasi PBJ tingkat dasar. Setelah melakukan ujian sertifikasi PBJ tingkat dasar, apabila peserta lulus atau dinyatakan kompeten maka akan mendapatkan e-sertifikat. Sedangkan, apabila tidak lulus maka dapat melakukan pembelajaran mandiri ulang, konsultasi pembelajaran, dan pengajuan ujian sertifikasi kembali. Sebelumnya, pada saat masih menjalankan proses pelaksanaan pelatihan mandiri, BPSDM juga menyelenggarakan *coaching clinic* untuk para pesertanya agar lebih menguasai materi dan untuk persiapan ujian sertifikasi.

Dalam proses pelaksanaan Pelatihan PBJP Level-1 beberapa peserta mengungkapkan adanya kelebihan dan kekurangan serta harapan. Pendapat tersebut terdapat kesamaan dan perbedaan dari setiap pesertanya. Beberapa peserta tersebut adalah lima orang peserta Sista Praja Pelatihan PBJP Level-1 tahun 2021-2022 yang penulis wawancarai, yaitu Ahsin Achfas, Nindy Asrifah D., Buggy Agung N., R. A. Yoga Pratama dan Fanikal Zulfari R. yang semuanya merupakan Aparatur di Lingkungan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Beberapa pendapat tersebut seperti pada tabel 1

**Tabel 1.** Pendapat Beberapa Peserta Sista Praja Mengenai Proses Pelaksanaan Pelatihan PBJP Level-1

Kelebihan	Kekurangan	Harapan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keseluruhan proses efektif dan runut.</li> <li>- Sebelum melanjutkan ke modul selanjutnya harus membereskan modul sebelumnya.</li> <li>- Terdapat <i>pre test</i>, ujian modul, <i>try out</i>, dan <i>post test</i>, sampai evaluasi menilai proses pembelajaran.</li> <li>- Materi lengkap, mudah didapatkan, terdapat latihan soalnya.</li> <li>- Diakhir latihan soal disertai keterangan jawaban apa yang benar.</li> <li>- Tampilan mudah dipahami.</li> <li>- Pelatihan gratis, fleksibel.</li> <li>- Koordinasi dengan penyelenggara administrasi cukup aktif melalui grup whatsapp/telegram.</li> <li>- Tidak perlu mencari diklat yang datang ke tempat karena sudah tersedia <i>online</i>, belajar mandiri di Sista Praja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zoom Sista Praja Pelatihan PBJP Level-1 hanya 1-2 kali.</li> <li>- Tidak ada nomor whatsapp mentor khusus untuk konsultasi ketika kesulitan dalam memahami materi.</li> <li>- Waktu <i>try out</i> bisa tidak terbatas dan tidak ada keterangan jawaban huruf apa yang benar. Tidak seperti latihan soal awal.</li> <li>- Tampilan bingung untuk orang awam.</li> <li>- Terdapat nomor latihan soal yang loncat-loncat.</li> <li>- Peserta dapat membuat akun kedua.</li> <li>- Peserta tidak dapat dikontrol dan bisa membuat niat para peserta menjadi malas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya nomor whatsapp mentor khusus untuk membahas saat ada ketidakpahaman materi.</li> <li>- Adanya klasikal khusus praktik Pengadaan Barang/Jasa atau melakukan praktik di OPD masing-masing yang diawasi mentor BPSDM.</li> <li>- Membuat tampilan Sista Praja lebih menarik.</li> <li>- Peningkatan fitur pengawasan untuk peserta membaca materi.</li> <li>- Adanya verifikasi wajah saat pendaftaran akun agar tidak ada yang membuat akun kedua.</li> <li>- Peningkatan kesadaran peserta untuk adanya niat melakukan pembelajaran.</li> </ul>

- Peserta dapat mengajukan sendiri pelatihan tanpa menunggu disposisi.		
--	--	--

Sumber: Olahan Penulis, 2023

### 3) Proses Pelaksanaan Pelatihan yang Dilakukan Peserta

Pada proses pelaksanaan Pelatihan PBJP Level-1 melalui Sista Praja tahun 2021-2022, diketahui terdapat ASN yang tidak menyelesaikan pelatihan. Hal tersebut diketahui dari data yang penulis punya, yaitu pada tahun 2021 jumlah awal peserta pelatihan yang terdaftar adalah sebanyak 121 orang, sedangkan yang menyelesaikan pelatihan hanya 34 orang. Lalu, pada tahun 2022, jumlah awal peserta pelatihan sebanyak 480 orang, sedangkan yang menyelesaikan pelatihan sampai *post test* sebanyak 59 orang. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dirasakan oleh peserta, yaitu komitmen untuk menyelesaikan pelatihan dan niat peserta. Hal tersebut juga menjadi kelemahan dari proses penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN melalui Sista Praja, dimana tidak dapat mengukur komitmen dari aparatur tentang kesadaran peserta untuk menyelesaikan target pembelajaran mandiri selama satu bulan. Diketahui juga terdapat para peserta yang malas untuk menyelesaikan karena banyak kegiatan sehingga melupakannya. Kelemahan tersebut seperti yang disampaikan oleh Irma Yuliawantini sebagai Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda, yaitu sebagai berikut :

*"... Kelemahannya kita tidak dapat mengukur komitmen dari aparatur. Dalam target pembelajaran satu bulan, kita tidak bisa menuntut komitmen dari aparatur, karena yang dikedepankan itu adalah awareness dari aparatur." (Wawancara, Maret 2023)*

Komitmen peserta yang malas, banyak mempunyai kegiatan dan melaksanakan tugas pokok fungsi dalam pekerjaan mereka membuat peserta tidak menyelesaikan pelatihannya. Peserta juga tidak menyelesaikan karena terkendala dengan niat dalam melanjutkannya. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Raden Andrian Yoga Pratama yang merupakan peserta Pelatihan PBJP Level-1 tahun 2022, yaitu bahwa :

*"... Karena self-learning itu menurut saya kelemahannya itu tergantung dari niat. Istilahnya kalau misalkan dengan pembelajaran yang dikontrol itu jelas waktu kapan buat memulai-mulai gitu, kalau self-learning memang materi lebih mudah didapatkan tergantung kitanya, tapi kelemahannya ya niatnya itu. Kalau memang tidak ada niat kadangkala malas, belum ada niat. Maksudnya belum ada niat meneruskan lagi itu jadinya belum mengerjakan lagi." (Wawancara, Maret 2023)*

Selain itu, mengenai motivasi dan minat para Peserta Pelatihan PBJP Level-1 melalui Sista praja yang tidak menyelesaikan pelatihan sebenarnya ada dan besar. Namun sayangnya terkendala dalam niat yang belum terkumpul. Peserta juga pada awal pemilihan proses kegiatan pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui Sista Praja dikarenakan masih mencoba-coba mencari sistem yang enak untuknya. Peserta lainnya juga terdapat tidak menyelesaikan pelatihan disebabkan karena terdapat peralihan peraturan lama dan baru saat itu. Sehingga hanya fokus pada beberapa modul saja.

Dengan adanya peserta yang tidak menyelesaikan, maka dibuatlah kontrak belajar atau *Building Learning Commitment* dan menyelenggarakan pelatihan yang serupa di bulan berikutnya untuk memberikan kesempatan menyelesaikan pelatihan yang sekarang. Dengan adanya peserta yang tidak menyelesaikan pelatihan tersebut menyebabkan target aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi mungkin saja bisa menjadi turun bagi BPSDM. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Irma Yuliawantini sebagai Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda, yaitu bahwa :

*“Melaksanakan pelatihan yang serupa di bulan berikutnya dengan target pembelajaran satu bulan, sehingga memberikan kesempatan kepada aparatur yang belum menyelesaikan pelatihannya di bulan kemarin/bulan lalu dengan harapan dia dapat menyelesaikan pelatihan di bulan yang sekarang. Untuk akibat ASN tidak menyelesaikan pelatihan bagi BPSDM, target aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi mungkin saja bisa menjadi turun.” (Wawancara, Maret 2023)*

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan pelatihan yang dilakukan peserta belum efektif dikarenakan tidak semua peserta menyelesaikan pelatihan jika dibandingkan dengan jumlah awal peserta terdaftar. Hal tersebut dikarenakan oleh komitmen masing-masing peserta pelatihan. Dimana terdapat peserta yang merasa malas atau terkendala pada niatnya untuk melanjutkan pembelajaran mandirinya.

#### 4) Kondisi Kegiatan Internal Organisasi

Adanya proses internal yang berjalan dengan lancar dapat menggambarkan bahwa organisasi tersebut efektif. Dimana setiap bagian internal terkoordinasi secara baik dan memiliki produktivitas yang tinggi. Kegiatan terhadap sumber-sumber yang dimiliki organisasi juga dapat menggambarkan tingkat efisiensinya.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa kegiatan internal yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki untuk menggambarkan tingkat efisiensinya sudah baik. Dimana, dari sumber anggaran yang bisa ditekan, tidak perlunya menyediakan tempat pelatihan, dan pemanfaatan sumber daya manusia yang ada untuk penyelenggara pelatihan. Lalu, keefektifan bagian internal organisasi dalam proses pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN melalui Sista Praja pada Pelatihan PBJP Level-1 seperti kerjasama dan koordinasi berjalan dengan baik. Kebaikan tersebut membuat kegiatan organisasi masih berlanjut.

Selain itu, untuk mendukung Sista Praja, organisasi dalam hal ini penyelenggara bekerja sama membentuk tim optim. Tim optim tersebut untuk memastikan orang-orang yang mengikuti pelatihan terlayani dengan baik. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Tugiman yang merupakan Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, yaitu bahwa :

*“Untuk mendukung Sista Praja, kita mencoba adaptasi organisasi dengan membentuk tim optim, yang dia itu mencoba menjadi penyelenggara dari Sista Praja. Terus karena Sista Praja ini bukan organisasi organik, berarti itu bukan khusus organisasi tertentu tapi dia itu adalah salah satu pelaksanaan tupoksi, maka tidak ada organisasi khusus yang menanganinya cuma kita support dengan dibentuknya tim yang khusus menangani Sista Praja. Tim ini nanti bertugas memastikan*

*Sista Praja dapat diakses, yang kedua memastikan bahwa orang-orang yang mengikuti pelatihan tersebut terlayani dengan baik.” (Wawancara, Maret 2023)*

Selanjutnya, produktivitas organisasi yang makin meningkat. Dimana terciptanya inovasi baru, yaitu adanya *coaching clinic* yang menjaga organisasi agar dapat lebih produktif. *Coaching clinic* diadakan penyelenggara agar peserta Pelatihan PBJP Level-1 melalui Sista Praja lebih paham dengan materi dengan penguatan bersama Widyaiswara.

Terlihat juga bahwa perhatian atasan terhadap karyawan, semangat, kerja sama, loyalitas kelompok kerja, saling percaya dan komunikasi antara karyawan dengan pimpinan berjalan dengan baik. Kegiatan tersebut membuat proses penyelenggaraan Sista Praja Pelatihan PBJP Level-1 berlanjut dengan menggunakan sumber-sumber yang ada serta efisiensi dan produktivitas internal organisasi yang baik. Dari penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa kondisi kegiatan internal organisasi dapat dikatakan efektif.

### **3. Pendekatan Sasaran**

Pendekatan sasaran dimulai dengan mengidentifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapainya (Lubis, 2011). Dalam pendekatan sasaran mengenai pengembangan kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Aparatur Jabar Diajar (Sista Praja) tahun 2021-2022 pada Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1, diketahui bahwa :

#### **1) Tingkat Keberhasilan Organisasi dalam Mencapai Sasaran**

Pada penyelenggaraan Sista Praja Pelatihan PBJP Level-1 memiliki sasaran untuk ASN Provinsi Jawa Barat dan ASN Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jawa Barat serta untuk ASN di luar Provinsi Jawa Barat. Selain itu, tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan yang luas kepada aparatur untuk mengikuti Pelatihan PBJP Level-1 tanpa dibatasi ruang, waktu, dan biaya serta mendapatkan sertifikat dan meningkatkan indeks profesionalitas ASN melalui 20 Jam Pelajaran. Sista Praja juga memiliki target meningkatkan kesadaran aparatur untuk mengikuti pengembangan kompetensi.

Dari sasaran yang ditetapkan, menurut hasil penelitian, diketahui bahwa peserta yang mengikuti Pelatihan PBJP Level-1 melalui Sista Praja merupakan Aparatur yang berasal dari Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Aparatur Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, yang mengikuti pelatihan, dilihat dari tren tahun-ketahun lebih dari seratus orang, sehingga animo dari aparatur untuk mengikuti Sista Praja besar. Dari hal tersebut maka diketahui bahwa peserta yang mengikuti pelatihan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan. Selanjutnya keefektifan pengembangan kompetensi ASN melalui Sista Praja dari sasaran dan tujuan dapat dilihat dari perbandingan nilai *pre test* dengan nilai *post test* serta dapat dilihat dari persentase kelulusan peserta yang mengikuti ujian kompetensi.

Dilihat dari nilai *pre test* peserta pada awal pelatihan dan nilai *post test* peserta di akhir pelatihan, diketahui rata-rata nilai tersebut mengalami kenaikan. Diketahui dari rekapitulasi nilai *pre test* dan *post test* dari 34 orang peserta Pelatihan PBJP Level-1 tahun anggaran 2021, memiliki rata-rata nilai *pre test* 80,82 dan mengalami kenaikan pada rata-rata nilai *post test*, yaitu menjadi 94,15. Dengan adanya kenaikan rata-rata nilai test peserta pada awal dan akhir pelatihan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pelatihan telah efektif meningkatkan kompetensi para peserta.

Selanjutnya, mengenai presentase kelulusan peserta yang mengikuti ujian kompetensi, dari data yang diperoleh oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu, jumlah tingkat kelulusan mencapai sekitar 50%. Dalam pencapaian kelulusan sekitar 50% tersebut dapat dikatakan bagus, walaupun seharusnya 100% dan minimal target nasional 80%, namun apabila dibandingkan dengan kelas *offline*, Sista Praja Pelatihan PBJP Level-1 lebih tinggi atau bahkan dengan rata-rata nasional. Kelulusan tingkat nasional adalah 18-20% dan kelulusan yang *offline* di Jawa barat baru 16%. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Tugiman yang merupakan Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, yaitu bahwa :

*"Karena dibandingkan dengan yang kelas offline, kita lebih tinggi atau bahkan dengan rata-rata kelulusan tingkat nasional. Kelulusan tingkat nasional ya 18-20%. Kelulusan yang offline di Jawa Barat itu baru 16%, artinya dia 50% itu bagus."* (Wawancara, Maret 2023)

Jumlah kelulusan peserta Pelatihan PBJP Level-1 melalui Sista Praja tersebut di dukung oleh data yang ada. Dimana pada tahun 2021, dari jumlah peserta yang menyelesaikan *post test* sebanyak 34 orang, memiliki jumlah peserta yang lulus uji kompetensi sebanyak 11 orang atau 32%. Selanjutnya pada tahun 2022, dari 59 orang yang telah menyelesaikan pelatihan sampai akhir, sebanyak 29 orang yang lulus uji kompetensi atau sebanyak 49% tingkat kelulusannya sebagaimana pafa tabel 2.

**Tabel 2.** Jumlah Peserta Pelatihan PBJP Level-1 Tahun 2021-2022 melalui Sista Praja yang Lulus Uji Kompetensi

Periode	Telah Menyelesaikan Pelatihan (Pre Test sampai Post Test)	Lulus Uji Kompetensi	Persentase
Tahun 2021	34	11	32%
Tahun 2022	59	29	49%

Sumber: Olahan Penulis, 2023

Lalu, seperti yang dijelaskan sebelumnya, jumlah kelulusan peserta Sista Praja Pelatihan PBJP Level-1 dalam ujian kompetensi lebih besar dari jumlah kelulusan peserta Pelatihan PBJP Level-1 lainnya. Hal tersebut di dukung dengan data mengenai perbandingan jumlah peserta Pelatihan PBJP Level-1 yang melalui Sista Praja dengan yang melalui Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum (PKTU) BPSDM Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan secara *blended learning* tahun 2021-2022. Pada Pelatihan PBJP Level-1 yang diselenggarakan Bidang PKTU tersebut merupakan campuran antara *e-learning*nya LKPP selama 10 hari dan tatap muka bisa secara klasikal selama 3 hari. Hasil dari pelatihan tersebut menunjukkan

bahwa jumlah peserta yang lulus uji kompetensi sebanyak 19% pada tahun 2021 dan 2022. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 3 di bawah ini

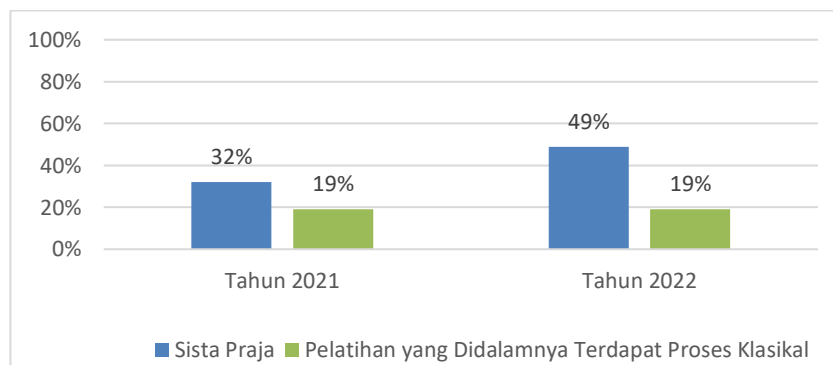
**Tabel 3.** Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan PBJP Level-1 Bidang PKTU secara *Blended Learning*

Periode	Jumlah Peserta Pelatihan	Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar PBJP		
		Jumlah Peserta Terdaftar	Jumlah Peserta Lulus	Persentase
Tahun 2021	368	368	69	19%
Tahun 2022	461	435	84	19%

Sumber: Olahan Penulis, 2023

Maka, dari data yang telah disampaikan menunjukkan bahwa jumlah kelulusan peserta Pelatihan PBJP Level-1 melalui Sista Praja lebih besar dibandingkan dengan yang *blended learning*. Hal tersebut dapat diketahui dari presentase hasil kelulusan peserta pelatihan melalui Sista Praja dengan pelatihan dari Bidang PKTU yang didalamnya terdapat proses tatap muka klasikal. Perbandingan persentase kelulusan peserta pelatihan sebagaimana grafik 1 di bawah ini :

**Grafik 1.** Perbandingan Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan PBJP Level-1 melalui Sista Praja dengan yang Lainnya



Sumber: Olahan Penulis, 2023

Berdasarkan grafik 1 diketahui bahwa persentase kelulusan tersebut dipengaruhi oleh soal yang susah menurut para peserta. Adanya ketidakkelulusan tersebut hampir seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil survei, tingkat kelulusan akan lebih besar apabila peserta masih muda atau belum lima tahun di tempat kerja. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh penyelenggara Pelatihan PBJP *blended learning*, Ibu Rida Maulani sebagai Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat, yaitu bahwa :

*“Karena kebanyakan peserta mengeluh katanya soalnya susah dan kadang teori dan soal yang keluar itu beda ... Adanya ketidakkelulusan tersebut itu hampir seluruh Indonesia seperti itu. Kalau misalkan secara global itu untuk kedepannyapun kita mau ada semacam sarasehan itu, karena berdasarkan hasil survei kita itu untuk kelulusan itu lebih besar kalau misalnya dia masih CPNS, masih muda dan belum 5 tahun di tempat kerja.” (Wawancara, Maret 2023)*

Sehingga, dari Sista Praja Pelatihan PBJP Level-1 yang telah diselenggarakan, tingkat kelulusan yang belum mencapai seratus persen disebabkan oleh beberapa hal. Selain soal yang dirasa susah atau sulit dan teori yang didapatkan dengan soal yang diberikan dirasa berbeda, faktor tidak adanya praktik PBJP untuk menangani kasus



secara langsung juga mempengaruhi. Dimana terdapat peserta yang mengharapkan adanya penyelenggaraan praktik PBJP secara langsung. Selain itu, kondisi peserta yang tidak bisa hadir ujian dan peserta yang kurang percaya diri saat mengerjakan soal serta kurangnya waktu untuk mendalami materi karena masih dibebankan tugas pekerjaan juga mempengaruhi kelulusan ujian. Hal tersebut juga salah-satunya seperti yang disampaikan oleh Bugy Agung Nugraha yang merupakan peserta pelatihan tahun 2021, yaitu dari *try out* ke *try out* soalnya agak berbeda dengan ujiannya. Lalu, belum maksimal belajar sebelum ujian.

Dari penjelasan yang telah dijabarkan, dapat diketahui bahwa peserta Pelatihan PBJP Level-1 melalui Sista Praja mengalami kenaikan nilai *pre test* dengan *post test* yang menunjukkan adanya peningkatan kompetensi. Selain itu, walaupun persentase tingkat kelulusan uji kompetensi para peserta Pelatihan PBJP Level-1 melalui Sista Praja belum mencapai seratus persen, setelah dilakukan penelitian, bahwa hasil tersebut masih dapat dikatakan bagus karena lebih tinggi dari pada rata-rata persentase kelulusan tingkat nasional dan tingkat kelulusan pelatihan *offline* Jawa Barat.

Selanjutnya, didukung dari peserta yang setuju bahwa setelah melakukan Pelatihan PBJP Level-1 melalui Sista Praja, tujuan pemenuhan 20 Jam Pelajaran terpenuhi dan meningkatkan kompetensinya. Selain hal tersebut, peserta juga merasakan beberapa manfaat setelah mengikuti Pelatihan PBJP Level-1. Manfaat tersebut adalah selain peningkatan kompetensi, pelatihan juga menambah relasi untuk *sharing* mengenai kepegawaian, dan dengan kelulusan memperoleh sertifikat, dapat digunakan untuk mengikuti diklat lain yang ditunjuk oleh pimpinan yang bersyaratkan telah memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Level-1, serta dapat sah menjadi pejabat panitia pemeriksa pengadaan barang jasa.

Dengan kelulusan peserta hasil dari Pelatihan PBJP Level-1 melalui Sista Praja ini, peserta dapat mengaplikasikan materi dan ilmu yang diperoleh kedalam pekerjaannya. Dari peserta Pelatihan PBJP Level-1 tahun 2021 yang diwawancarai oleh penulis, yaitu Bugy Agung N., menyatakan telah menerapkan sebagian ilmu yang diperoleh seperti pada proses alur pengadaan. Peserta mengetahui terdapat seleksi apa saja yang harus dibeli atas dasar yang mana. Lalu, bagaimana cara menghitungnya untuk mencapai tahap ke perencanaan. Selanjutnya, peserta Pelatihan PBJP Level-1 tahun 2022 seperti Ahsin Achfas dan Ibu Nindy Asrifah D., menyatakan telah mengaplikasikan ilmu yang diperoleh kedalam pekerjaannya. Pengaplikasian tersebut seperti dapat menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan, paham syarat/tata cara membuat dokumen pemeriksaan barang, dan memiliki gambaran mengenai serah terima. Peserta juga dapat lebih mengerti substansi PBJ berdasarkan peraturan. Dengan adanya hal tersebut, mempermudah melaksanakan tuntutan pekerjaan/tugas jabatan peserta. Selain itu, peserta mendapatkan apresiasi dari instansi tempat bekerjanya, yaitu diberikan tanggung jawab menjadi pejabat pengadaan.

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran cukup efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari sasaran dan tujuan yang terpenuhi. Sista Praja telah memberikan kesempatan yang luas kepada ASN Provinsi Jawa Barat dan ASN Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jawa Barat untuk mengikuti pelatihan. Hasil dari pelatihan tersebut menaikkan kompetensi peserta yang dapat dilihat dari nilai tes awal dan akhir peserta yang mengalami peningkatan. Selanjutnya, jumlah persentase kelulusan uji kompetensi walau belum mencapai seratus persen yang dipengaruhi oleh soal yang sulit, tidak adanya praktik PBJP secara langsung, peserta yang kurang percaya diri dan kurangnya waktu dalam mendalami materi, ternyata masih diatas rata-rata nasional dan *offline* Jawa Barat. Peserta juga dapat mengaplikasikan ilmu yang mereka peroleh dari pelatihan ke dalam pekerjaannya sehingga mempermudah pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai efektivitas pengembangan kompetensi ASN melalui Sista Praja oleh BPSDM Provinsi Jawa Barat tahun 2021-2022 studi pada Pelatihan PBJP Level-1, dapat disimpulkan bahwa Efektifitas Sista Praja pada Pelatihan PBJP Level-1 tahun 2021-2022 dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya sumber anggaran untuk pengembangan aplikasi Sista Praja yang berpengaruh pada bahan pembelajaran pelatihan. Dengan adanya hal tersebut, BPSDM menurunkan beberapa target dan bekerja sama dengan pihak lain. Selain itu, pada proses penyelenggaraan pelatihan dirasakan peserta memiliki kelebihan dan kekurangan serta terdapat peserta yang tidak menyelesaikan pelatihannya diakibatkan oleh komitmen pribadi peserta dalam menyelesaikan pembelajaran mandirinya. Sista Praja telah memberikan kesempatan yang luas kepada ASN untuk mengikuti pengembangan kompetensi 20 JP, namun hasil persentase kelulusan belum mencapai seratus persen diakibatkan oleh soal yang dirasa sulit, kehadiran dan kepercayaan diri peserta dalam menjalankan ujian, juga kurangnya waktu dalam memahami materi serta tidak adanya praktik PBJP secara langsung. Di sisi lain, persentase tersebut diatas rata-rata dan pelatihan dapat meningkatkan kompetensi peserta yang dapat dilihat dari kenaikan nilai *pre test* dengan *post test* serta pengaplikasian ilmu yang diperoleh peserta ke dalam pekerjaannya.

### Referensi

Basri, W. S., Huseno, T., & Johannes, A. W. (2021). Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam Penerapan Pelatihan Nonklasikal pada Era Revolusi Industri 4.0 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 1–12.

- Basuki, N. (2019). Analisis Resiko yang Dirasakan dan Prestasi Belajar Peserta Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 57–64.
- Hidayat, R., & Chandrawati, T. (2023). Kinerja Satpol PP dalam Tugas dan Fungsi Sebagai Penegak Peraturan Daerah di Kabupaten Tana Tidung. *NeoRepublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 520-528.
- Kadarisman, M. (2018). *Manajemen Aparatur Sipil Negara*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Lubis, S. B. H. (2011). *Organisasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Mustafa, D. (2014). *Birokrasi Pemerintahan (Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Nainggolan, B. R. M., & Sipahutar, T. R. M. (2022). Pelatihan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. *Abdimas Galuh*, 4(1), 293–301.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Yuliawantini, I. (2021). *Sistem Pembelajaran Aparatur Jabar Diajar (Sista Praja)*.